

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang mampu memenuhi kriteria-kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM dapat dikategorikan sebagai berikut: 1) usaha mikro yaitu pelaku usaha yang memiliki aset paling banyak Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), dan maksimal omzet sebesar Rp 300 juta. 2) usaha kecil, yaitu pelaku usaha yang memiliki aset paling banyak Rp 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), dengan omzet lebih dari Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar. 3) usaha menengah yaitu usaha yang memiliki aset lebih dari Rp 500 juta hingga 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan), dengan omzet mulai dari Rp 2,5 miliar hingga 50 miliar (ojk.go.id, 2019).

UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. UMKM mampu menyerap tenaga kerja dan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan produk Domestik Bruto (PDB). UMKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia (Abdurohim, 2023). Salah satu tantangan besar yang dihadapi UMKM di Indonesia adalah adaptasi terhadap era digital. Digitalisasi bukan hanya sekadar tren, namun telah menjadi salah satu pilar yang utama dalam mempercepat pertumbuhan UMKM di Indonesia. Penerapan digitalisasi membuka peluang bagi para pelaku

UMKM yang sebelumnya hanya terbatas pada metode perdagangan konvensional. Ada beberapa peran digitalisasi dalam pertumbuhan UMKM yaitu: 1) meningkatkan efisiensi pasar dan produktivitas, 2) memperluas jaringan pasar, 3) meningkatkan daya saing, 4) stabilitas keuangan dan keberlanjutan, serta 5) merespon perubahan gaya hidup (Kundiharto, 2023).

UMKM pada umumnya bermasalah dalam keuangan. Menurut survei Bank Indonesia terbaru pada MSME Empowerment Report 2022, 69,5% UMKM belum menerima pinjaman. Menurut survei BI, tantangan ini bersumber dari rendahnya literasi keuangan peminjam atau UMKM. Selain itu, masih banyak UMKM yang melakukan transaksi manual yang sering kali tidak memiliki pencatatan yang intensif, membuat laporan tidak lengkap dan proses pencatatan yang tidak teratur dan tidak terstruktur. Padahal laporan keuangan yang tertata dan teratur membantu pelaku usaha dalam mendapatkan layanan keuangan yang lebih komprehensif, misalnya untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berikutnya adalah masalah yang berkaitan dengan adopsi digital. Tantangan berkaitan dengan adopsi digital yaitu, minimnya pengetahuan dan keterampilan di kalangan UMKM dan karyawan. Serta tantangan akses meminjam dana kepada bank sebagai sumber keuangan usaha agar pelaku UMKM dapat berinvestasi pada teknologi dan infrastruktur digital (Mawarsari, 2023).

Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (BI) Yunita Sari memaparkan masalah dan tantangan UMKM yang di Indonesia yaitu mempertahankan UMKM dalam ekosistem digital dan

tantangan dalam memperluas akses keuangan. Hanya 25% UMKM Indonesia yang memiliki akses keuangan (Soehandoko,2023). Strategi yang harus dilakukan adalah melalui pemahaman literasi keuangan agar bisa mengelola usaha dengan baik (Marija, 2021). Kurangnya literasi keuangan di kalangan pengusaha mikro menyebabkan mereka kesulitan dalam mengakses pembiayaan eksternal (Topimin & Hashim, 2020). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) literasi keuangan adalah serangkaian kegiatan atau proses agar pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), keterampilan (*skill*), konsumen dan masyarakat luas meningkat, dengan harapan masyarakat mempunyai kemampuan dalam bidang manajemen keuangan secara memadai (Syuhada, 2022).

Berdasarkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68%. Persentase tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Handaryadi, 2023). Kepala Eksekutif Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widayari menyampaikan bahwa pelaku UMKM perlu dibekali dengan keterampilan literasi keuangan yang semakin kompleks. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan maka kemampuan pengelolaan usaha yang dimiliki seseorang juga akan membaik (ojk.go.id, 2023). Pengelolaan keuangan yang buruk merupakan salah satu penyebab masalah bagi UMKM karena apabila pengelolaan keuangan UMKM tidak berjalan baik maka dapat menghambat kemajuan UMKM dan menghambat dalam mendapatkan pembiayaan. Mengatur

dan mengelola keuangan usaha secara efektif dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga aliran dana usaha sehingga tidak terjadi kesalahan yang berakibat pada kerugian finansial (Santiara & Sinarwati, 2023).

Selain hambatan dalam literasi keuangan, UMKM juga mengalami hambatan dalam penerapan teknologi informasi, Menurut Kementerian komunikasi dan informatika, pada tahun 2022 terdapat 64 juta unit UMKM di seluruh Indonesia. Namun, jumlah UMKM digital yang mampu berbisnis secara online baru 19 juta unit usaha atau 29%. Berdasarkan laporan hasil survei *Boston Consulting Group* dan telkom Indonesia, mayoritas UMKM terkendala dalam melakukan transformasi digital (Ahdiat, 2022). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Saleh & Hadiyat, 2016), persoalan tingkat pendidikan pelaku UMKM sangat berkorelasi dengan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai pendukung pengelolaan UMKM di daerah perbatasan Kabupaten Belu Provinsi NTT.

Menurut hasil survei Otoritas Jasa Keuangan, indeks literasi keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 sebesar 51,95 % (Handaryadi, 2022). Kepala bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, NTT, Ady Mandala menjelaskan total UMKM di NTT sebanyak 98.270 unit dengan jumlah usaha menetap sebanyak 81.428, per tahun 2021, yang bergerak di sembilan sektor usaha yang tersebar di 22 Kabupaten / Kota (Botha, 2023).

Jumlah UMKM yang terdapat di Kota Kupang sebanyak 8.551 unit usaha yang terdiri dari enam (6) Kecamatan.

Tabel 1.1
Data Jumlah UMKM Kota Kupang Per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Unit Usaha
1	Alak	1.099
2	Kota Lama	1.163
3	Kota Raja	1.023
4	Kelapa Lima	1.643
5	Oebobo	2.007
6	Maulafa	1.616

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM NTT (2024)

Dari data jumlah UMKM tersebut dapat dilihat bahwa Kota Kupang memiliki pelaku UMKM yang sangat banyak. Namun, dalam mengembangkan usahanya pelaku UMKM di Kota Kupang yang termasuk didalamnya adalah UMKM Kecamatan Kota Lama mengalami kendala permodalan dan kendala pemasaran yang sangat tergantung pada kemampuan atau *skill* pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital (Tani, Alo 2023). Kepala dinas koperasi UMKM Kota Kupang *Danbert Ndapamerang* juga menjelaskan beberapa masalah yang terjadi pada pelaku UMKM Kota Kupang dalam memperluas pasar di era digital. Permasalahan tersebut adalah branding, kualitas, kuantitas, dan pelayanan pelaku UMKM yang masih lemah (Victorynews.id, 2021).

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada UMKM yang ada di Kota Kupang khususnya di wilayah Kecamatan Kota Lama Kota Kupang. Kecamatan Kota Lama merupakan sebuah wilayah yang sangat strategis karena terletak di kawasan wisata yang ramai dikunjungi serta mudah diakses dalam hal pemasaran dan putaran uang. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM NTT, jumlah pelaku usaha Kecamatan Kota Lama sebanyak 1.163 unit usaha dan rata-rata penghasilannya Rp 5.000.000-Rp 360.000.000 per tahun. Dengan lokasinya yang berada di pusat aktivitas

ekonomi, kecamatan Kota Lama menjadi salah satu destinasi yang menarik bagi para pengusaha dan pelaku bisnis untuk mengembangkan usaha mereka (Dinas Koperasi UMKM NTT 2024).

UMKM di Kecamatan Kota Lama terdiri dari 4 jenis sektor usaha yang terdiri dari a) sektor industri dan pengelolaan, b) sektor pertanian peternakan perikanan dan kehutanan c) sektor jasa-jasa dan d) sektor perdagangan hotel dan rumah makan. Lama usaha maksimal 25 tahun dan minimal 3 tahun (Dinas Koperasi dan UMKM NTT 2024).

Tabel 1.2
Data Usaha Kecamatan Kota Lama Berdasarkan Kriteria Usaha

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Usaha Mikro	674
2	Usaha Kecil	489

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM NTT

Dari tabel di atas, terlihat bahwa usaha mikro memiliki usaha yang lebih banyak dibandingkan dengan usaha kecil, ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kecamatan Kota Lama lebih banyak yang berada pada level mikro dari pada kecil. Selain itu, data jumlah usaha menengah tidak tercantum karena pelaku usaha menengah tidak melapor ke Dinas Koperasi dan UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Rochmah at al., (2023) menunjukkan bahwa pelaku UMKM mengalami kendala yaitu kesulitan dalam mengakses pembiayaan karena rendahnya literasi keuangan. Pelaku UMKM masih belum memahami pencatatan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, sehingga mereka kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank. Selain itu, ada juga pelaku usaha yang tidak memisahkan uang pribadi dengan uang hasil

usaha, yang menyebabkan mereka kesulitan menentukan keuntungan dan kerugian dari usaha mereka. Fenomena yang sama terjadi di Kecamatan Kota Lama, dimana mereka mengalami fenomena yang serupa yaitu ketidakmampuan dalam pengelolaan keuangan yang baik menghambat akses mereka terhadap sumber pembiayaan.

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) berusaha keras meningkatkan kemampuan pelaku usaha agar dapat menyusun laporan keuangan usahanya dengan lebih baik dan sesuai dengan standar perbankan. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kepercayaan pihak perbankan dalam memberikan kredit kepada pelaku UMKM. Bekraf berusaha memberikan aplikasi laporan keuangan yang mudah serta dapat diterapkan pada UMKM. Dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi laporan keuangan akan mempermudah pelaku UMKM mengakses dan mengelola informasi, termasuk laporan keuangan. Penerapan teknologi akan mempermudah para pelaku UMKM untuk mengurangi terjadinya kesalahan dan keterlambatan pelaporan keuangan (Amelia, et al., 2023).

Selain masalah di atas penelitian ini dilakukan karena adanya *research gap* antara penelitian-penelitian sebelumnya (Syuhada, 2022) menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja usaha dalam mempertahankan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sedangkan pada penelitian Mawarni, et al., (2023) menunjukkan bahwa 1) secara parsial literasi keuangan dan e-commerce berpengaruh negatif terhadap kinerja UMKM, 2) secara simultan literasi keuangan, finansial teknologi, e-commerce dan penggunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan

terhadap kinerja UMKM. Pada penelitian (Akhmad & Purnomo, 2021) menunjukkan bahwa Teknologi Informasi memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di Kota Surakarta berupa peningkatan jumlah pesanan yang diterima, peningkatan jumlah produksi, peningkatan pendapatan dan penambahan jumlah konsumen yang baru, sedangkan pada penelitian (Putri, et al., 2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tambun Selatan.

Berdasarkan latar belakang diatas dan tidak kosistenan hasil penelitian sebelumnya, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut untuk menguji apakah dalam konteks penelitian ini pengaruhnya positif atau negatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Literasi Keuangan dan Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kemajuan UMKM di Era Digital Pada Kecamatan Kota Lama Kota Kupang.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka dalam penulisan ini dapat dituliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kemajuan UMKM pada era digital di Kecamatan Kota Lama Kota Kupang?
2. Apakah penerapan teknologi informasi berpengaruh terhadap kemajuan UMKM pada era digital di Kecamatan Kota Lama Kota Kupang?

3. Apakah literasi keuangan dan penerapan teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap kemajuan UMKM pada era digital di Kecamatan Kota Lama Kota Kupang?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kemajuan UMKM pada era digital di Kecamatan Kota Lama Kota Kupang
2. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kemajuan UMKM pada era digital di Kecamatan Kota Lama Kota Kupang
3. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan penerapan teknologi Informasi secara simultan terhadap kemajuan UMKM pada era digital di Kecamatan Kota Lama Kota Kupang

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang teoritis dan praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut

- 1) Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan keilmuan untuk kalangan akademis dan sebagai referensi bacaan yang berkaitan dengan pengaruh literasi keuangan dan dampak penggunaan teknologi informasi terhadap kemajuan UMKM pada era digital.

2) Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi para praktisi UMKM dan dapat menambah pemahaman yang lebih baik tentang literasi keuangan dan penerapan teknologi informasi dalam kemajuan UMKM pada era digital.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam membentuk kebijakan dan merancang strategi untuk kemajuan UMKM di era digital melalui literasi keuangan dan penerapan teknologi informasi.